
ARTICLE

EVALUASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PERBANDINGAN SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG DAN SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG)

Sukma Maulana¹ Eko Budi Sulistio² Dian Kagungan³

123 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Sukma Maulana, Eko Budi Sulistio dan Dian Kagungan (2026) Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (Spmb) Di Kota Bandar Lampung (Studi Perbandingan Smp Negeri 2 Bandar Lampung Dan Smp Negeri 45 Bandar Lampung)

Article History

Received: 18 April 2026

Accepted: 19 Mei 2026

Keywords:

Policy Evaluation

New Student Admission System

SPMB

CIPP

Educational Equity

Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan

Sistem Penerimaan Murid Baru

SPMB

CIPP

Pemerataan Pendidikan

ABSTRACT

The implementation of the New Student Admission System (SPMB) in Bandar Lampung City under the Minister of Primary and Secondary Education Regulation Number 3 of 2025 still faces challenges in achieving equitable student distribution. This condition is reflected in the contrast between SMP Negeri 2 Bandar Lampung, which experiences high applicant interest, and SMP Negeri 45 Bandar Lampung, which remains under-enrolled despite having available capacity. This study aims to evaluate the implementation of the SPMB policy in Bandar Lampung City and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its success. This research uses a descriptive qualitative approach through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using Stufflebeam's CIPP evaluation model consisting of context, input, process, and product evaluation. The findings show that, in the context aspect, SPMB emerged as a corrective policy to address disparities in the previous admission system, yet geographical boundaries and domicile administration still affect access, especially in border areas. In the input aspect, institutional reputation, facilities, human resources, and digital readiness shape school attractiveness and policy implementation. In the process aspect, online registration and verification have supported transparency, but server disruptions, invalid documents, and unequal digital literacy remain obstacles. In the product aspect, SPMB has improved access through domicile and affirmation pathways, but equal distribution of students between schools has not been fully achieved. Therefore, SPMB requires stronger socialization, more reliable digital infrastructure, equalization of school facilities, and special policy arrangements for border-area schools.

ABSTRAK

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 masih menghadapi tantangan pemerataan distribusi peserta didik. Kondisi tersebut terlihat dari perbedaan antara SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang memiliki minat pendaftar tinggi dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung yang masih belum memenuhi daya tampung meskipun memiliki kapasitas tersedia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi

* Corresponding Author
Email : sukma@gmail.com

kebijakan SPMB di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model evaluasi CIPP dari Stufflebeam yang meliputi context, input, process, dan product. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek context, SPMB hadir sebagai koreksi terhadap ketimpangan dalam sistem penerimaan sebelumnya, namun faktor batas wilayah dan administrasi domisili masih memengaruhi akses, terutama bagi sekolah di wilayah perbatasan. Pada aspek input, reputasi kelembagaan, fasilitas sekolah, sumber daya manusia, dan kesiapan sistem digital berpengaruh terhadap daya tarik sekolah dan pelaksanaan kebijakan. Pada aspek process, pendaftaran dan verifikasi daring telah mendukung transparansi, tetapi masih terdapat kendala berupa gangguan server, dokumen tidak valid, serta perbedaan literasi digital masyarakat. Pada aspek product, SPMB telah memperluas akses melalui jalur domisili dan afirmasi, namun pemerataan distribusi peserta didik antarsekolah belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, kebijakan SPMB memerlukan penguatan sosialisasi, peningkatan infrastruktur digital, dan pemerataan akses sekolah.

A. INTRODUCTION

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional karena berfungsi membentuk sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan memiliki daya saing. Dalam konteks kebijakan publik, pemenuhan hak pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga pemerataan akses, kualitas layanan, serta keadilan dalam memperoleh kesempatan belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab memastikan kebijakan pendidikan berjalan secara adil dan dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dirancang untuk mendukung pemerataan pendidikan adalah sistem penerimaan peserta didik baru. Sebelumnya, pemerintah menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi sebagai mekanisme untuk mendekatkan peserta didik dengan sekolah di sekitar tempat tinggalnya dan mengurangi stigma sekolah favorit. Namun, pelaksanaan zonasi belum sepenuhnya mampu menyelesaikan ketimpangan antarsekolah karena perbedaan fasilitas, reputasi, akses geografis, dan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah masih memengaruhi pilihan orang tua. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerataan akses melalui jarak belum otomatis menghasilkan pemerataan mutu pendidikan (Syakarofath et al., 2020).

Sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya, pemerintah memperkenalkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang mengintegrasikan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Kebijakan ini diatur melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan diturunkan dalam kebijakan daerah, termasuk Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2025. SPMB diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan melalui sistem digital serta verifikasi data yang lebih tertib. Dalam kerangka administrasi publik, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengatur distribusi kesempatan pendidikan secara lebih proporsional dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Kota Bandar Lampung menjadi salah satu daerah yang menghadapi persoalan pemerataan distribusi peserta didik pada jenjang SMP negeri. Data penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 2 Bandar Lampung memiliki tingkat peminat yang tinggi, sedangkan SMP Negeri 45

Bandar Lampung masih menghadapi persoalan keterisian daya tampung. Pada tahun pelajaran 2025/2026, SMP Negeri 2 Bandar Lampung memiliki daya tampung 330 kursi dengan 769 pendaftar, sedangkan SMP Negeri 45 Bandar Lampung memiliki daya tampung 352 kursi dengan 140 pendaftar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan tidak hanya berhadapan dengan persoalan prosedural, tetapi juga dengan persepsi masyarakat terhadap reputasi sekolah, akses wilayah, dan kualitas fasilitas pendidikan.

Ketimpangan tersebut semakin kompleks pada sekolah yang berada di wilayah perbatasan. SMP Negeri 45 Bandar Lampung, misalnya, berada dekat dengan wilayah Lampung Selatan sehingga terdapat calon peserta didik yang secara jarak dekat dengan sekolah, tetapi terkendala batas administratif domisili. Situasi ini menunjukkan bahwa prinsip kedekatan geografis dalam jalur domisili belum sepenuhnya fleksibel dalam menjawab kondisi faktual masyarakat di daerah perbatasan. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan diperlukan untuk melihat apakah SPMB telah mampu mencapai tujuan pemerataan pendidikan atau masih memerlukan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan SPMB di Kota Bandar Lampung melalui studi perbandingan SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan model CIPP yang mencakup aspek context, input, process, dan product. Melalui model tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai hasil akhir kebijakan, tetapi juga menelaah latar belakang kebijakan, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, serta dampak kebijakan terhadap pemerataan akses pendidikan.

B. LITERATURE REVIEW

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan dan tindakan pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan masalah publik. Dye menjelaskan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan Dunn melihat kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang saling berkaitan untuk memecahkan persoalan masyarakat secara sistematis. Dalam konteks pendidikan, kebijakan penerimaan murid baru menjadi instrumen pemerintah untuk mengatur distribusi akses layanan pendidikan agar berlangsung transparan, objektif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, SPMB tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai bentuk intervensi negara dalam mengelola kesempatan pendidikan.

Kebijakan pendidikan memiliki dimensi distributif karena menentukan siapa yang memperoleh akses, melalui jalur apa akses tersebut diberikan, dan bagaimana negara memastikan kelompok rentan tidak tertinggal. Kebijakan penerimaan murid baru menjadi penting karena proses seleksi sekolah negeri sering kali dipengaruhi oleh reputasi sekolah, kapasitas daya tampung, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan akses geografis. Jika kebijakan hanya mengatur mekanisme seleksi tanpa memperhatikan ketimpangan mutu sekolah, maka pemerataan yang dihasilkan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh substansi kualitas pendidikan.

Evaluasi Kebijakan Model CIPP

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai tujuan, standar, dan kebutuhan masyarakat. Model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam menilai kebijakan melalui empat dimensi utama, yaitu context, input, process, dan product. Context evaluation digunakan untuk memahami kebutuhan, masalah, dan tujuan kebijakan. Input evaluation menilai kesiapan sumber daya, strategi, fasilitas, dan aktor pelaksana. Process evaluation mengamati pelaksanaan kebijakan, kesesuaian prosedur, serta kendala yang muncul. Product evaluation menilai hasil, manfaat, dan dampak kebijakan terhadap sasaran yang dituju.

Dalam penelitian ini, model CIPP relevan karena pelaksanaan SPMB tidak cukup dinilai dari jumlah siswa yang diterima, tetapi harus dilihat dari keterkaitan antara masalah awal, kesiapan pelaksana, mekanisme implementasi, dan capaian pemerataan. Model ini memungkinkan evaluasi yang lebih utuh terhadap kebijakan SPMB, terutama karena kebijakan penerimaan murid baru melibatkan banyak aktor seperti Dinas Pendidikan, sekolah, operator, orang tua, serta calon peserta didik.

Sistem Penerimaan Murid Baru

SPMB merupakan kebijakan penerimaan murid baru yang menggantikan dan menyempurnakan pola PPDB sebelumnya. Kebijakan ini membagi jalur penerimaan ke dalam jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur domisili menekankan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah, jalur afirmasi memberi ruang bagi kelompok rentan secara sosial ekonomi, jalur prestasi memberikan penghargaan terhadap capaian akademik dan nonakademik, sedangkan jalur mutasi mengakomodasi perpindahan tugas orang tua atau kondisi tertentu. Kombinasi jalur ini diharapkan mampu menciptakan proses seleksi yang lebih adil dan tidak semata-mata bertumpu pada nilai akademik.

Walaupun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan berbasis zona atau domisili masih menghadapi tantangan serius. Ketimpangan fasilitas, citra sekolah favorit, keterbatasan sosialisasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta ketidakseimbangan daya tampung dapat menghambat pencapaian tujuan pemerataan pendidikan (Darmawan & Diantari, 2024). Dengan demikian, efektivitas SPMB sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan sekolah dalam menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik wilayah, terutama bagi sekolah yang berada di daerah pinggiran atau perbatasan.

C. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan SPMB di Kota Bandar Lampung, khususnya pada dua satuan pendidikan yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali dinamika kebijakan, persepsi aktor pelaksana, kendala teknis, serta persoalan sosial yang muncul dalam implementasi kebijakan.

D. RESULT AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMB di Kota Bandar Lampung telah berjalan secara prosedural, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pemerataan pendidikan. Perbedaan antara SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung memperlihatkan bahwa daya tarik sekolah tidak hanya ditentukan oleh jarak dan jalur penerimaan, tetapi juga oleh reputasi, fasilitas, akses wilayah, dan persepsi masyarakat terhadap mutu sekolah. Perbandingan data penerimaan berikut memperlihatkan adanya ketimpangan yang menjadi dasar penting dalam pembahasan hasil penelitian.

Tabel 1. Perbandingan SPMB SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2025/2026

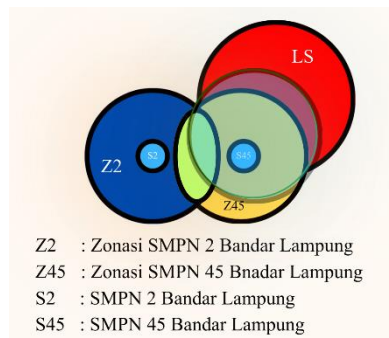
Sekolah	Daya Tampung	Jumlah Pendaftar	Tingkat Keterisian	Keterangan
SMP Negeri 2 Bandar Lampung	330	396	120%	Peminat tinggi dan melebihi kapasitas
SMP Negeri 45 Bandar Lampung	352	140	39,77%	Peminat rendah dan kuota belum optimal

Sumber: Diolah peneliti dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2025.

Context Evaluation: Latar Belakang dan Masalah Kebijakan

Aspek konteks menunjukkan bahwa SPMB diterapkan sebagai respons terhadap persoalan ketimpangan akses dan dominasi sekolah favorit dalam sistem penerimaan sebelumnya. Kebijakan ini berupaya mengurangi konsentrasi peserta didik pada sekolah tertentu melalui pembagian jalur penerimaan yang lebih beragam. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, ketimpangan tersebut tampak pada perbandingan antara SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung. SMP Negeri 2 memiliki tingkat peminat yang sangat tinggi karena reputasi historis, fasilitas, dan kepercayaan masyarakat, sedangkan SMP Negeri 45 Bandar Lampung masih berupaya membangun citra kelembagaan sebagai sekolah yang relatif baru dan berada pada wilayah yang lebih berkembang.

Konteks wilayah perbatasan menjadi temuan penting dalam penelitian ini. SMP Negeri 45 Bandar Lampung berada dekat dengan wilayah Lampung Selatan, sehingga terdapat calon peserta didik yang secara geografis dekat dengan sekolah tetapi tidak dapat mengakses sekolah tersebut karena terkendala administrasi domisili. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis domisili belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas ruang masyarakat di daerah perbatasan. Dalam kondisi seperti ini, pemerataan akses membutuhkan fleksibilitas kebijakan agar siswa yang berada dekat secara faktual tetap memperoleh peluang masuk ke sekolah negeri terdekat.



Gambar 1. Diagram Zonasi
Sumber: Diolah peneliti, 2026.

Temuan konteks juga memperlihatkan bahwa masalah pemerataan tidak hanya berkaitan dengan pembagian jalur seleksi, tetapi juga dengan persepsi masyarakat. Orang tua cenderung memilih sekolah yang dianggap memiliki reputasi lebih baik, fasilitas lebih lengkap, dan prestasi lebih dikenal. Akibatnya, sekolah yang telah memiliki citra unggul tetap menjadi tujuan utama, sedangkan sekolah yang sedang berkembang belum menjadi pilihan utama meskipun memiliki daya tampung yang lebih besar. Dengan demikian, kebijakan SPMB perlu dibaca sebagai kebijakan yang telah menjawab sebagian masalah akses, tetapi masih menghadapi tantangan pada persepsi mutu dan kondisi geografis.

Input Evaluation: Kesiapan Sumber Daya dan Sarana Pendukung

Aspek input menunjukkan bahwa keberhasilan SPMB dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem digital, dan dukungan kelembagaan. Dinas Pendidikan memiliki peran dalam menyiapkan regulasi, petunjuk teknis, sistem pendaftaran, serta koordinasi dengan sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah, guru, panitia, dan operator menjadi aktor penting dalam memastikan pendaftaran, verifikasi berkas, dan pengumuman berjalan sesuai prosedur. Kesiapan aktor pelaksana menjadi faktor penting karena SPMB menuntut pemahaman teknis sekaligus kemampuan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Perbedaan input antara SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan SMP Negeri 45 Bandar Lampung terlihat pada reputasi, fasilitas, dan daya tarik kelembagaan. SMP Negeri 2 Bandar Lampung memiliki

reputasi historis yang kuat dan fasilitas yang lebih dikenal masyarakat, sehingga sekolah ini menjadi pilihan utama bagi banyak calon peserta didik. Sebaliknya, SMP Negeri 45 Bandar Lampung masih membutuhkan penguatan branding sekolah, peningkatan sosialisasi, dan pengembangan fasilitas agar mampu menarik lebih banyak pendaftar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan fasilitas sekolah.

Kesiapan sistem digital juga menjadi bagian penting dalam input kebijakan. Website pendaftaran dan kanal informasi sekolah membantu masyarakat memperoleh informasi tentang jalur penerimaan, kuota, persyaratan, dan hasil seleksi. Namun, masih ditemukan kendala seperti gangguan server, sinkronisasi data yang lambat, dan penilaian jalur prestasi yang belum sepenuhnya otomatis. Hambatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi kebijakan membutuhkan dukungan infrastruktur yang stabil, operator yang kompeten, dan sistem yang mudah digunakan oleh masyarakat.

Process Evaluation: Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi

Aspek proses menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB di Kota Bandar Lampung secara umum telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Proses dimulai dari penyebaran informasi, pendaftaran daring, pengunggahan dokumen, verifikasi berkas, seleksi berdasarkan jalur penerimaan, hingga pengumuman hasil. Sekolah dan Dinas Pendidikan berupaya menggunakan website, media sosial, banner, dan koordinasi langsung untuk menyampaikan informasi kepada orang tua dan calon peserta didik. Upaya ini menunjukkan adanya orientasi transparansi dalam pelaksanaan SPMB.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala administratif dan teknis. Beberapa masalah yang muncul antara lain data pendaftar tidak valid, dokumen buram atau tidak terbaca, kesalahan input, typo pada data pribadi, pengunggahan file yang tidak sesuai, serta ketidaksesuaian titik domisili. Kendala tersebut menyebabkan proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama dan menimbulkan keluhan dari masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan proses tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem daring, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami persyaratan dan mengikuti prosedur pendaftaran dengan benar.

Gangguan server juga menjadi kendala yang cukup menonjol dalam proses pendaftaran daring. Ketika jumlah pengguna meningkat, sistem dapat mengalami penurunan performa sehingga calon pendaftar mengalami kesulitan mengakses layanan. Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap regulasi di tingkat sekolah dan masyarakat dapat menimbulkan kebingungan, terutama pada jalur prestasi, afirmasi, dan domisili. Oleh karena itu, proses SPMB membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif, panduan teknis yang sederhana, serta peningkatan kapasitas server agar pelayanan berjalan lebih efektif.

Product Evaluation: Hasil Kebijakan dan Pemerataan Pendidikan

Aspek produk menunjukkan bahwa SPMB telah menghasilkan beberapa capaian positif, terutama pada peningkatan transparansi dan perluasan akses melalui jalur domisili dan afirmasi. Sistem digital memungkinkan informasi penerimaan lebih mudah dipantau oleh masyarakat, sedangkan jalur afirmasi memberi peluang bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses sekolah negeri. Capaian ini menunjukkan bahwa SPMB telah bergerak ke arah kebijakan yang lebih terbuka dan inklusif.

Meskipun demikian, pemerataan distribusi peserta didik antarsekolah belum tercapai secara optimal. Perbedaan keterisian antara SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 45 menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan belum sepenuhnya mampu mengubah pola preferensi masyarakat. Sekolah yang dianggap favorit tetap memiliki kelebihan pendaftar, sedangkan sekolah yang kurang dikenal masih belum memenuhi kuota. Dengan kata lain, SPMB dapat memperbaiki prosedur seleksi, tetapi belum cukup kuat untuk mengatasi ketimpangan kualitas dan citra sekolah secara langsung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah di wilayah perbatasan memerlukan kebijakan khusus. Siswa yang tinggal dekat dengan sekolah tetapi berada di luar batas administratif kota perlu dipertimbangkan melalui skema koordinasi antar daerah atau fleksibilitas aturan domisili tertentu. Tanpa pengaturan tersebut, siswa di sekitar sekolah perbatasan berpotensi tidak memperoleh akses ke

sekolah terdekat, sementara sekolah masih mengalami kekurangan pendaftar. Oleh karena itu, produk kebijakan SPMB harus dilanjutkan dengan perbaikan regulasi, pemerataan fasilitas, dan strategi peningkatan citra sekolah agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai lebih substantif.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Evaluasi CIPP Kebijakan SPMB

Aspek CIPP	Temuan Utama	Implikasi Kebijakan
Context	SPMB menjawab persoalan ketimpangan akses, tetapi batas administratif dan wilayah perbatasan masih menghambat kedekatan faktual siswa dengan sekolah.	Perlu fleksibilitas kebijakan bagi sekolah perbatasan dan pemetaan ulang akses sekolah.
Input	Kesiapan SDM, fasilitas, reputasi sekolah, dan sistem digital belum merata antara sekolah favorit dan sekolah yang berkembang.	Perlu pemerataan fasilitas, penguatan branding sekolah, dan peningkatan kapasitas operator.
Process	Pendaftaran daring berjalan sesuai prosedur, namun masih terkendala server, validitas dokumen, dan literasi digital orang tua.	Perlu server yang lebih stabil, panduan teknis sederhana, dan sosialisasi yang lebih luas.
Product	Transparansi dan akses afirmasi meningkat, tetapi distribusi peserta didik antarsekolah belum optimal.	Perlu intervensi mutu sekolah dan kebijakan distribusi yang lebih adaptif.

Sumber: Diolah peneliti, 2026.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor pendukung pelaksanaan SPMB di Kota Bandar Lampung meliputi keberadaan regulasi yang jelas, dukungan Dinas Pendidikan, keterlibatan operator sekolah, penggunaan sistem digital, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi publik. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah membantu pelaksanaan pendaftaran berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, sistem digital memberikan ruang keterbukaan karena masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kuota, persyaratan, dan hasil penerimaan secara lebih mudah.

Faktor penghambat pelaksanaan SPMB meliputi gangguan server, data pendaftar yang tidak valid, kesalahan input dokumen, rendahnya literasi digital sebagian orang tua, serta sosialisasi yang belum merata. Hambatan lain berkaitan dengan ketimpangan fasilitas dan reputasi sekolah, sehingga sekolah yang lebih dikenal tetap menjadi pilihan utama. Pada wilayah perbatasan, hambatan administratif domisili juga menjadi persoalan karena calon peserta didik yang dekat secara jarak tidak selalu dapat mendaftar ke sekolah terdekat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa perbaikan SPMB harus dilakukan secara multidimensi, tidak hanya pada sistem pendaftaran, tetapi juga pada pemerataan mutu sekolah dan penguatan komunikasi kebijakan.

E. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SPMB di Kota Bandar Lampung telah berjalan cukup baik secara prosedural dan menunjukkan arah kebijakan yang mendukung pemerataan akses Pendidikan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada aspek context, SPMB hadir sebagai koreksi atas ketimpangan sistem penerimaan sebelumnya, tetapi faktor geografis, domisili, dan batas administratif masih menjadi tantangan, terutama bagi sekolah di wilayah perbatasan.
2. Pada aspek input, kesiapan sumber daya manusia, fasilitas sekolah, reputasi kelembagaan, sistem digital, dan dukungan regulasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. SMP Negeri 2 Bandar Lampung memiliki daya tarik lebih kuat karena reputasi dan fasilitas, sedangkan SMP Negeri 45 Bandar Lampung masih membutuhkan penguatan branding, sosialisasi, dan peningkatan fasilitas agar dapat menarik minat pendaftar secara lebih optimal.
3. Pada aspek process, pelaksanaan pendaftaran daring, verifikasi dokumen, dan pengumuman hasil telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, proses tersebut masih menghadapi kendala berupa gangguan server, validasi data yang memakan waktu, kesalahan input dokumen, dan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat.

4. Pada aspek product, SPMB telah meningkatkan transparansi dan memperluas akses melalui jalur domisili dan afirmasi, tetapi pemerataan distribusi peserta didik antarsekolah belum tercapai secara optimal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa SPMB memerlukan penguatan lebih lanjut melalui peningkatan kapasitas server, sosialisasi yang lebih masif kepada orang tua, penyederhanaan prosedur teknis, pemerataan fasilitas sekolah, serta kebijakan khusus bagi sekolah di wilayah perbatasan. Pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pengaturan jalur penerimaan, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan mutu semua sekolah agar masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih merata terhadap setiap satuan pendidikan.

REFERENCES

- Abdan, M. (2023). Evaluasi Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Pringsewu (Studi SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu).
- Affrian, R. (2023). Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan. CV Bintang Semesta Media.
- Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan. *REFORMASI*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Ardianti, A. V., & Supriyanto. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama.
- Darmawan, D., & Diantari. (2024). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sistem Zonasi Menggunakan Model CIPP di Kabupaten Trenggalek. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 223-240. <https://doi.org/10.59024/bhinneka.v2i3.860>
- Dewi, D. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi.
- Kartika Sari, D., & Soliha, E. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Reputasi Sekolah Terhadap Word of Mouth: Peran Mediasi Kepercayaan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 18(1).
- Kurniawan, A. F., Sulistio, E. B., & Karmilasari, V. (2024). Aksesibilitas Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kota Bandar Lampung. 18(01), 43-52. <https://doi.org/10.37295/wp.v18i1.65>
- Mardatila, A., Listalia, H., Luqyana, K., Alvina, L., Putri Wijaya, M., Faiza Khairani, N., Amini Putri, N., Lilla Yusa, N., Adiza Putri, R., Salsabila, R., Pohan, R., Zahra Zafira, S., & Widiyastuti, Y. (2025). Optimizing the Management of the New Student Admission System (SPMB) at the Junior High School Level. *International Journal of Education*, 3(2), 63-72.
- Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung.
- Pertiwi, E. V. J., Pradiani, T., & Pelayanan, K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, dan Word of Mouth terhadap Keputusan Orang Tua Memilih Sekolah di SMP SBN. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9). <http://Jiip.stkipyapisdmpu.ac.id>
- Pratama, M. M., Izhari, F., & Akbar, A. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2). <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14073>

- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastra, J. (2019). The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education.
- Putri, D., Meritasari, R., Dhulhijjahyani, F., Rahman, A., Untari, S., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2024). Analisis Implementasi dan Kualitas Pendidikan pada Kebijakan Zonasi di Kota Blitar. *Journal of Education Research*, 5(2).
- Riski Tri Widyastuti. (2020). Dampak Perlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*.
- Rusmini, & Ristanto. (2025). Kebijakan Akses Pendidikan Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Wonogiri 2025.
- Suryanti, P., Musadad, A. A., & Isawati. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. *Jurnal Candi*, 20.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 115-130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Tauhid, K., & Fauziah. (2024). Implementasi Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Winarti, N., Rahmi, K., Octa, R., Charin, P., Maritim Raja, U., & Haji, A. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210-225. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.35793246>
- Yenti, A., & Utami, M. (2024). Mengurai Tantangan dan Peluang PPDB Berbasis Zonasi: Menuju Pemerataan Pendidikan Berkualitas di Indonesia.